

SKRIPSI

PLURALISME KOTA MAKASSAR

PENERIMAAN KOMUNITAS MAHASISWA PAPUA

DI KOTA MAKASSAR



DISUSUN OLEH:

ADI NUSAID

E111 16 005

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN PENGESAHAN



Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI

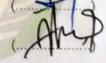
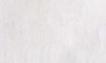
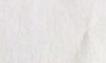
**PLURALISME KOTA MAKASSAR PENERIMAAN KOMUNITAS
MAHASISWA PAPUA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh
ADI NUSAID
E111 16 005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, pada hari Kamis, tanggal 2021

Menyetujui,

PANITIA UJIAN:

Ketua	: Dr. Phill. Sukri, M. Si.	
Sekretaris	: Dr. Sakinah Nadir, M.Si.	
Anggota	: Haryanto, S.IP, M.A.	
Anggota	: Andi Naharuddin, S.IP, M. Si.	
Pembimbing I	: Drs. Phill. Sukri, M. Si.	
Pembimbing II	: Dr. Sakinah Nadir, M. Si.	

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI NUSAID

NIM : E111 16 005

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul :

"Pluralisme Kota Makassar, Penerimaan Komunitas Mahasiswa Papua Di Kota Makassar" adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Januari 2022

Yang Menyatakan

ADI NUSAID

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Adi Nusaid. NIM E111 16 005. *Pluralisme Kota Makassar* Penerimaan Komunitas Mahasiswa Papua Di Kota Makassar Di bawah bimbingan **Dr. Phil. Sukri, S.IP.,M.Si. Dan Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si.**

Indonesia merupakan Negara yang plural, baik dari segi sisi budaya, etnis, bahasa, dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia yang begitu beranekaragam dapat menimbulkan perselisihan yang cukup banyak, mengingat negara ini adalah negara multikultural dan juga plural. Salah satunya keberadaan Komunitas Mahasiswa Papua diluar dari wilayahnya sering mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan terhadap keberadaannya. Di tahun 2017,2018 dan 2019 Dikriminalisasi komunitas mahasiswa papua dipulau jawa cukup tinggi, hingga penyerangan di asrama mereka oleh oknum aparat negara dan juga ormas. Ketidakterimaan mereka terhadap suatu suku/etnik tertentu dapat menimbulkan konflik.

Namun, Kondisi kota Makassar merupakan salah satu daerah yang sangat majemuk atau memiliki keragaman. Hampir semua suku yang berbeda di Indonesia mendiami kota makassar. Kemungkinan terjadinya konflik seperti kota besar di pulau jawa sangat bisa terjadi dilihat dari demografinya, bahkan diskriminalisasi terhadap Komunitas Mahasiswa Papua yang mendiami kota Makassar dapat terjadi. Ada perbedaan yang terjadi dikota makassar, komunitas Mahasiswa papua cenderung dapat di terima keberadaannya di dibandingkan dengan daerah lain, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Asrama Komunitas papua yang berada di kota makassar

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan baik Masyarakat Kota makassar dengan Komunitas Mahasiswa Papua tidak terlepas dari fakta sejarah yang panjang, bahwa Makassar adalah daerah Pular dari Indonesia Timur, dan papua pernah menjadi bagian dari penyebaran pedagang Bugis Makassar. Namun, disini lain menjaga hubungan yang baik dengan warga sekitar menjadi hal terpenting untuk menciptakan situasi yang harmonis, menjunjung tinggi nilai toleransi dan juga membuka diri terhadap lingkungan baru. Serta menghindari dari Mis-informasi yang sampai kemasyarakat kota makassar tentang hal papua yang berbau negatif, hingga mencegah terjadinya penyebaran luas paham OPM di kota Makassar.

Kata kunci : Penerimaan Komunitas Mahasiswa Papua.

ABSTRACT

Adi Nusaid. NIM E111 16 005. *Pluralism Makassar City Papua Student Community Admission in Makassar City Under the Guidance of Dr.Phil. Sukri, S.IP.,M,Si. and Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si.*

Indonesia is a plural country, both in terms of culture, ethnicity, language, and religion. This shows that Indonesia is so diverse that it can cause quite a lot of disputes, considering that this country is a multicultural and plural country. One of them is the existence of the Papuan Student Community outside their territory which usually gets unpleasant treatment for their existence. In 2017, 2018 and 2019 there was an high level of criminalization of the Papuan student community on the Java Island, resulting in attacks on their dormitories by state apparatus and mass organizations. Their disapproval of a certain tribe/ethnic cause to conflict.

However, the condition of Makassar City is one area that is very diverse or has diversity. There almost all the different tribes in Indonesia live in Makassar. The possibility of a conflict such as a big city on the Java Island is very possible, judging from its demographics, and even discrimination against the Papuan Student Community who inhabit the city of Makassar can be occur. There are differences that happened in the city of Makassar, the Papuan student community tends to be accepted in comparison to other areas, that can be seen from the large number of Papuan Community Dormitory in the city of Makassar.

The results of this study explain that the good relationship between the Makassar City Community and the Papuan Student Community cannot be apart from the long historical fact, that Makassar is the centre area of Eastern Indonesia, and Papua was once of part of distribution form Bugis Makassar traders. However, on the other hand, maintaining good relations with local residents is the most important thing to create a harmonious situation, upholding the value of tolerance and also opening up to new environments. And also avoiding a miss-information that reaches the society in the Makassar city about the negative things of Papua, so as to prevent the widespread of OPM ideologi in the city of Makassar.

Keyword: Acceptance of Papua Student Community

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *rabbi* *lamin* Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Pluralisme Kota Makassar Penerimaan Komunitas Mahasiswa Papua di Kota Makassar**” salam dan shalawat juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini namun berkat segala bantuan tenaga dan doa dari semua pihak yang menemani perjalanan penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka pada kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Almarhum Ayah Abd. Rasyid, A.Ma dan Ibu Hj. Sayang yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Saya juga ingin berterima kasih

kepada diri sendiri yang tentunya berjuang menyelesaikan Skripsi ini. Kepada Saudara-saudaraku Mukhawas Rasyid, SH,MH. Istina Murti Rasyid, S.Pd, dan Rasyiati Rasyid, S.Pd yang tak hentinya mendoakan dan memberikan semangat meskipun jauh dalam jangkauan namun kasih sayangnya selalu terasa. Kepada Rosmi Rahim dan Ir. Rusdi Yusuf, Terima kasih segala dukungan serta semangat yang diberikan terhadap penulis. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tiada hentinya memberikan semangat, perhatian, motivasi dan doa.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr.Phil.Sukri, M.Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Dr.Sakinah Nadir, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak **Dr. Suparman Abdullah, M.Si**, selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Perencanaan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak **Dr. Hasrullah, M.Si**, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muh, Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Kakak Umni Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati, S.IP, M.Si, Endang**

- Sari, S.IP,M.Si.** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf fakultas khususnya Ibu **Ija**, Ibu **Muli** dan pak **Ancu**, serta staf dan pegawai departemen ilmu politik khususnya **Bapak Hamzah, Ibu Musriati dan Ibu Hasna**, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
 9. Kepada seluruh Infroman yakni, Ismail Bachtiar, Ahmad Nur, Abdi Mahesa, serta teman-teman Komunitas IKMAFAK Papua Barat, yang telah meluangkan waktunya memberi informasi yang akurat.
 10. Kepada keluarga besar **IKMB-UNHAS** dan **SAPMA-PP Kom. Unhas** yang telah menjadi rumah dan tempat belajar penulis sehingga bisa seperti sekarang ini.
 11. Kepada teman-teman diorganisasi **LSM LATENRITATTA LANKORAS-HAM, GANNA DPC KAB. BONE, FKM-BONE** dan **LSI** . Terima kasih telah memberi ruang dalam memperkaya pengalaman dalam kehidupan ini.
 12. Kepada teman-teman **ONLINE MEKI**, terutama **Pak Yani, Kak Trisno, Kak Rudi, Kak Ahkam, Kak Panji, Kak Khalakma, dan Kak Zul** yang terus memberi semangat dan nasehatnya.
 13. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 16 dan PRIPOL** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.

14. Kepada saudara-sudari sepanjang di Makassar, **Tasa, Dian(Alm), Darwin, Bias, Irwan, Anwar, Dias, Gazali, Wawan, Tomi, Iwan, Yus, Alfa, Kak Nasrul, Febrianti, Andi Septiani, Kak Fikar dan yang lainnya**, yang banyak memberikan pengalaman tentang dunia mahasiswa yang sesungguhnya.
15. Kepada teman-teman terbaikku, **Dahlan, Ashar, Mahatir dan Sri**, yang terus menemani dalam semua lingkaran perjalanan.
16. Kepada **Nurinsani, S.pd** wanita yang selalu menemani, menyemangati, dan terus memberi dukungan dalam bumbu-bumbu drama percintaan dan Semoga menjadi ibu dari anak-anak ku kelak..
Terima kasih atas Semuanya
17. *Thanks for my car, faithfully accompany me to pay my study costs.*

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Multikulturalisme.....	7
2.2 Pluralisme.....	10
2.3 Teori dan Konsep Konflik Antar etnis.....	16
2.3.1 Definisi Konflik	16
2.3.2 Konflik Antar Etnis	17
2.3.3 Bentuk-bentuk Konflik Sosial	25

2.3.4	Pencegahan Konflik(<i>Conflict Prevention</i>)	27
2.4	Telaah Pustaka	32
2.5	Kerangka Pemikiran	37
2.6	Skema Pikiran	38
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
3.1	Lokasi Penelitian	39
3.2	Pendekatan, Tipe, dan Jenis Penelitian	40
3.3	Sumber Data	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data	42
3.5	Informan Penelitian.....	43
3.6	Teknik Analisis data	46
BAB IV	47
GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1	Karakteristik Masyarakat Papua dan Makassar	47
4.2	Sejarah Hubungan Makassar dan Papua	49
4.2	Terbentuknya Komunitas Papua di Makassar	52
BAB V	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
6.1	Keberadaan dan Interaksi Komunitas Mahasiswa Papua Di Kota Makassar	56
6.2	Upaya Pencegahan Konflik dan Penerimaan Mahasiswa Papua di Makassar.....	61
BAB VI	74
PENUTUP	74
6.1	Kesimpulan	74
6.2	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Penelitian.....	37
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Nama-nama Informan.....	42
Tabel 1.2. Jumlah Kecamatan di Kota Makassar	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang plural, baik dari sisi budaya, etnis, bahasa, dan agama. Jumlah penduduknya 267 juta pada tahun 2019 dengan luas wilayah Indonesia 1,905 km² terbagi dalam kepulauan, terdiri 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota, 1.331 kelompok suku dan 6 agama yakni, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang tersebar seluruh Nusantara.¹

Pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Keragaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan riil oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Beragam/plural sebuah keunikan yang seharusnya terus terjaga.

Menurut Musa Asy'arie, hakikat pluralisme pada dasarnya tunggal, dan yang tunggal itu bereksistensi terus tanpa henti dalam melahirkan pluralitas. Pluralisme tidak semakin sederhana, namun menjadi semakin kompleks. Karena sesungguhnya proses tersebut akan terus berlangsung sepanjang masih ada kehidupan. Proses kehidupan yang menghasilkan pluralitas, pada hakikatnya adalah rangkaian sambung menyambung tidak berhenti kecuali jika kehidupan telah berakhir. Oleh karena itu pluralisme

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-me1ncapai-267-juta-jiwa>. Tanggal di akses 26/07/2020.

tidak dapat dihindarkan apalagi ditolak. Meskipun manusia cenderung untuk menolaknya, karena pluralisme dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi dirinya atau eksistensi kelompoknya. Walaupun sesungguhnya penolakan terhadap pluralisme sama artinya dengan menolak kehidupan itu sendiri.²

Pluralisme atau keragaman masyarakat yang merupakan suatu fenomena menarik, tetapi hal ini bisa menjadi pangkal konflik yang banyak terjadi sejak dahulu hingga sekarang.³ Di satu sisi adanya keragaman dapat diterima oleh masyarakat sebagai keniscayaan yang disikapi dengan arif, namun tak menutup kemungkinan disisi lain ternyata menimbulkan masalah yang cukup kompleks. Keragaman ini, diakui atau tidak akan menimbulkan berbagai persolan seperti yang sekarang dihadapi bangsa ini. Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Perseteruan Politik, Kemiskinan, Kekerasan, Perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati Hak-hak orang lain.

Pluralisme atau keragaman berpotensi menimbulkan ketegangan-ketegangan bahkan konflik antar etnik satu dengan yang lain, masing-masing kelompok pada waktu yang sama akan berusaha mempertahankan identitasnya termasuk pandangan ideologinya tentang etniknya. Akar konflik berada pada tataran *instrumental*, biasanya konflik

² Musa Asy'arie, Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir, h. 56-58. Tersedia : <http://repo.iain-tulungagung.ac.id.pdf>. Tanggal diakses 12/08/2020

³ Pluralism atau keragaman adalah sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri perbedaan ditengah masyarakat, namun keragaman ini dapat menimbulkan konflik sebab perbedaan antar suku atau etnik. Pluralisme dapat menimbulkan konflik hanya berlandaskan emosi sebab penduduk Indonesia saat ini mudah terpengaruhi informasi tanpa mengkaji menurut John Hick

itu akibatnya tidak terlalu luas dan dapat segera berhenti. Tetapi jika akar konflik berada pada tataran *ideologi*, biasanya akibatnya akan lebih besar dan dapat berlansung dalam waktu yang lama.

Dalam Undang-undang dasar Pasal 28 E ayat 1 UUD tahun 1945

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkan, serta berhak kembali”.⁴

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa warga Negara Indonesia dalam hal ini masyarakat berhak memilih tempat tinggalnya, begitupun masyarakat papua juga berhak tinggal dimana saja dan menjalankan segala kegiatannya, namun kenyataannya masyarakat papua cenderung sulit diterima diluar papua. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat papua dengan masyarakat asli didaerah yang menjadi tempat tinggal baru mereka. Konflik ini terjadi ada ketidak terimaan masyarakat asli terhadap kehadiran masyarakat papua dilingkungan mereka, secara hukum atau Indonesia mereka merespon kehadirannya, namun secara lingkungan dan pergaulan banyak daerah cenderung sulit menerima kehadiran masyarakat papua itu sendiri.

⁴ <https://www.hukumonline.com/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>. Tanggal diakses 12/08/2020.

Keberadaan masyarakat papua sangat sulit mendapatkan tempat di masyarakat, karena identik dengan pemberontakan untuk memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Organisasi Papua Merdeka(OPM) dan juga dianggap watak orang kulit hitam yang keras. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa Kota yang sering terjadi konflik yakni Yogyakarta terjadi sebanyak 3 kali di tahun 2018 dan 2019. Kota Malang dan Surabaya terjadi 4 kali kasus di tahun berbeda 2017, 2018 dan 2019, di kota bandung tidak terjadi kasus penyerangan namun intimidasi dan juga diskriminasi meningkat di tahun 2018 dan 2019, Jakarta terjadi 2 kasus di tahun yang berbeda 2018 dan 2019. kasus di kota malang dan subaraya juga membuat kegaduhan di monokowari papua.⁵ Hal ini membuktikan bahwa banyak penolakan masyarakat papua di kota-kota besar.

Namun, kondisi yang berbeda ditemukan di Kota Makassar. Dimana kota Makassar merupakan salah satu daerah yang sangat majemuk atau memiliki keragaman. Hampir semua suku yang berada di Nusantara ada di setiap sudut kota Makassar. Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, diantaranya yang signifikan jumlahnya adalah Suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik antar suku atau etnik. Salah

⁵ Sumber-sumber yang didapatkan berasal dari beberapa media online atau media cetak yang meliput atau memberikan keterangan, media-media yang memberikan ulasan info adalah media yang *Credibel*.

satu suku atau etnik yang tinggal di kota Makassar yakni Masyarakat Etnik papua yang dimana jumlahnya lebih dari 1000 mahasiswa papua yang tergabung di beberapa komunitas Kemahasiswaan. Sebagai pendatang tantangan yang dihadapi masyarakat atau komunitas mahasiswa papua adalah penerimaan masyarakat/penduduk asli kota Makassar. Jika melihat dari apa yang dikemukakan oleh Ben Andreson bahwa sulit bagi mereka untuk berinteraksi secara langsung dan menerima orang lain dalam lingkungannya, Namun, ada perbedaan yang terjadi di kota makassar, komunitas mahasiswa papua cenderung dapat di terima keberadaannya di bandingkan dengan daerah lain, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat/mahasiswa papua yang mendapatkan pendidikan dan juga pekerjaan di kota Makassar.⁶

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini ialah :

Mengapa masyarakat kota Makassar bisa menerima keberadaan komunitas mahasiswa papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk penerimaan masyarakat kota makassar terhadap keberadaan komunitas mahasiswa papua. Peneliti bertujuan untuk membuktikan bahwa masyarakat papua

⁶ Masyarakat papua di kota Makassar mampu diterima dengan pekerjaan yang dilakoni dari buruh kasar hingga pegawai swasta, mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi, terkadang dari perwakilan komunitas masyarakat papua menjadi pembicara di beberapa kegiatan mahasiswa kota Makassar.

mampu bertahan diantara penolakan atau ketidakterimaan masyarakat atas kehadiran mereka di daerah lain, sedangkan di kota Makassar mereka cenderung di terima secara sukarela.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi bahan acuan bagi pembaca atau masyarakat bahwa keradaan suku atau etnik. Secara khusus, penelitian ini akan menjadi acuan agar konflik mampu di minimalisir di tengah keberadaan kelompok, suku, atau etnik lain di daerahnya. Secara hukum, masyarakat diperbolehkan tinggal dimana saja tempat ada larangan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga dapat menjadi kajian bagi mahasiswa/akademisi lainnya yang nantinya berencana mengangkat penelitian serupa terkait bentuk penerimaan masyarakat papua.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat hubungan hidup rukun dengan masyarakat/komunitas papua dengan masyarakat kota Makassar. Apabila suatu ketika ada konflik yang terjadi diantara masyarakat/komunitas papua, maka penelitian ini diharapkan bisa jadi pengingat agar hidup rukun.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bagian ini membahas Kajian Pustaka sebagai landasan atau kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan riset atau penelitian sebelumnya.

2.1 Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah pendekatan kebijakan *public* untuk mengelola keragaman *cultural* dalam sebuah masyarakat yang majemuk suku-suku penyusunnya, dengan menekankan *mutual respect* dan toleransi terhadap kebhinnekaan budaya, dalam batas-batas sebuah Negara yang berdaulat. Kata ini di gunakan pertama kali untuk menyebut negara Swiss pada 1957, lalu di Kanada pada akhir 1960-an, Swedia pada 1975, dan sejak 1970-an mulai dikampanyekan di USA dan Negara-negara Eropa lain yang mempunyai permasalahan dan sumber daya serupa.

Dalam perspektif Negara Kanada, yang telah menerapkan multikulturalisme sebagai *public policy*, multikulturalisme dimengerti sebagai kepercayaan dasar bahwa semua warga Negara adalah setara (*equal*). Multikulturalisme menjamin setiap warga negara untuk memegang identitas mereka, berbangga atas nenek moyang dan warisan leluhur mereka, dan punya rasa handarbeni (*sense of belonging*) atas kultur mereka. Dengan penerimaan ini diharapkan warga negara Kanada memiliki rasa aman dan kepercayaan diri yang membuat mereka lebih

terbuka terhadap dan menerima kebhinneka budaya. Pengalaman orang-orang kanda telah membuktikan bahwa multikulturalisme yang disahkan sebagai kebijakan publik mendorong terciptanya relasi harmonis antar suku dan ras, pemahaman lintas-kultur yang lebih meningkatkan dan upaya atau tindak marginalisasi, kebencian, diskriminasi dan kekerasan menyurut.⁷

Will Kymlicka, dalam bukunya *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Clarendon Press, Oxford, 1995), memandang multikulturalisme dalam kerangka berfikir teori liberal, guna menjustifikasi perlakuan adil terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ia bagi menjadi 2 kategori dasar, yaitu : *polyethnic* atau kelompok-kelompok imigran, dan minoritas nasional (seperti Canadian Quebecois, atau suku Maori di Selandia Baru). Selain dua kelompok minoritas ini, Kymlicka juga mengakui aneka macam persoalan yang mendera para pengungsi, entah (mengungsi) karena konflik atau kemiskinan (orang-orang yang pindah ke negara lain untuk mencari taraf kehidupan yang lebih baik) dan kelompok-kelompok minoritas seperti Afro-Amerika yang asal usul keberadaan mereka di USA bukan karena kemauan sendiri melainkan karena perdagangan budak.

⁷ Hendar Putranto, *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm 117-118

Analisis Kymlicka berakar pada analisa sosial kontemporer yang dengan cermat mengamati fenomena terkini: keragaman etnis dan rasial dalam gugus masyarakat, dan keterhubungan antar masyarakat-masyarakat ini yang semakin meningkat (berkat kemajuan moda transportasi dan komunikasi modern). Keterhubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi antar elemen dalam masyarakat dan antar masyarakat itu sendiri telah memunculkan sejumlah isu sentral seperti identitas dan hak-hak (*rights*) di jantung gerakan sosial, pengalaman pribadi dan dalam kebijakan public⁸. Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang “given” tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan terhadap hal tersebut. Namun mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi, serta kesadaran dalam keberadaan.

⁸ *Ibid*, hlm 118

2.2 Pluralisme

Istilah pluralisme berasal dari kata plural, yang berarti sesuatu atau bentuk yang lebih dari satu. Pengertian pluralisme dalam konteks ini mencakup pengertian: pertama, keberadaan sejumlah kelompok orang dalam satu masyarakat yang berasal dari ras, agama, pilihan politik dan kepercayaan yang berbeda; kedua, suatu prinsip bahwa kelompok-kelompok yang berbeda ini bisa hidup bersama secara damai dalam satu masyarakat. Sebagai sebuah ciri dan sikap keberagaman, pluralisme dan pluralitas, sering dikacaukan maknanya, padahal pluralitas berarti suatu realitas nyata, sementara pluralisme bermakna sebuah kesadaran akan realitas tersebut.⁹

Menurut ilmuwan Anton M. Moeliono (1990), definisi pluralisme adalah pemaknaan jamak atau tidak satu seperti keberagaman kebudayaan di masyarakat. Ini berarti memberikan penghormatan terhadap golongan lain yang memiliki kebudayaan lain yang tidak sama seperti dirinya. Penghormatan tersebut terwujud dalam bentuk sikap saling menghormati dan menghargai yang merupakan pondasi dari terbentuknya pluralisme.¹⁰

⁹ Ariadna, Pluralisme, html, diakses pada tanggal 26 Januari 2011. Tersedia : <http://repository.uin-malang.ac.id/711/2/pluralisme.pdf>. Tanggal diakses 11/11/2020.

¹⁰ <https://www.kozio.com/term/pluralisme/> Tanggal di akses 29 Oktober 2021.

Pluralitas merupakan kenyataan dan realitas sosiologis. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa pluralitas mengandung bibit perpecahan, sehingga diperlukan toleransi, keterbukaan, kesetaraan, dan penghargaan. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dan bukan konflik dalam masyarakat. Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi sejati tanpa pluralisme. Pluralisme dalam konteks ini berarti adanya perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Pluralisme berarti membangun toleransi, yang mengharuskan adanya pengakuan bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing memiliki hak yang sama untuk eksis. Karena itu, yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi aktif.

Pluralisme bukan sinkretisme, juga bukan relativisme, dan tidak pula berarti mencampuradukkan agama. Justru karena pluralisme itu mengakui adanya keragaman dan perbedaan, maka perbedaan itu perlu dikembangkan.

Pluralisme sendiri mengandung beberapa makna sesuai dengan wacana yang mengikutinya. Meskipun sama-sama lahir dari rahim filsafat pencerahan, terutama yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Christian Wolff, pluralisme menunjukkan sebuah *doktrin* tentang melimpahnya pandangan dunia yang mungkin digabungkan dengan

harapan dapat mengadaptasi dan menghadapi nilai-nilai universal. Dalam wacana filsafat saat ini, konsep tentang pluralisme mengacu pada pandangan bahwa dunia bisa ditafsirkan dalam berbagai cara, atau untuk mengadakan evaluasi ilmu yang ternyata diperkaya oleh kompetisi antara berbagai macam tafsiran.¹¹ Pluralisme merupakan pandangan tentang keragaman antar semua umat agama dan etnik, keragaman sebaiknya di sikapi dengan toleransi sebagai bentuk kaya akan keragaman, namun tidak bisa di pungkiri bahwa pluralism cenderung mengakibatkan konflik antar etnik ataupun agama.

2.2.1 Pluralisme Dalam Ilmu Politik

Pluralisme merupakan suatu keyakinan terhadap apapun yang terjadi di dunia ini tidak dapat hanya dijelaskan melalui satu pandangan atau prinsip saja. Selain itu, pluralisme mengakui adanya keanekaragaman kondisi sosial, praktik institusional dan ideological, serta nilai-nilai yang timbul dari keanekaragaman tersebut. Pluralisme dalam politik berkembang sejak adanya karya Montesquieu yang berjudul *The Spirit of Laws* (1746). Dalam karyanya tersebut, Montesquieu menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang ideal merupakan sistem yang terdiri dari tiga badan yang terpisah yaitu: eksekutif, legislative, dan judikatif. Dari argumennya tersebut, dapat disimpulkan bahwa Montesquieu membenarkan idealnya sistem politik dengan sumber otoritas yang lebih dari satu (Dunleavy, Patrick and O'leary, Brendan, 1998).

¹¹ Ubed Abdilah S, Politik Identitas Etnik, Yayasan INDONESIA TERATA, magelang, 2002, hlm.03.

Amerika Serikat pun pada akhirnya menerapkan separation of power dengan tujuan untuk mengantisipasi implikasi terburuk dari pluralisme sosial . Menurut Madison dalam Dahl (1956) yang mengkritisi adanya pluralisme dalam institusi politik, pada dasarnya setiap manusia merupakan makhluk yang egois dan akan selalu mencari kekuatan lebih dalam hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan manusia tidak akan pernah puas dan dikhawatirkan akan terjadi benturan kepentingan antar individu dalam perpolitikan. Oleh karena itu diadopsi lah nilai-nilai pluralis yang salah satunya adalah “balance of authority”. Hal ini lah yang menunjukkan bahwa para founding father Amerika Serikat merupakan para pluralis (Dunleavy, Patrick and O’leary, Brendan, 1998).

Terdapat setidaknya lima konsep utama yang merupakan kunci dalam ilmu politik pluralis,

- a) Pertama adalah ilmu politik plural merupakan suatu kritik terhadap “state monism” yang lebih sering diekspresikan melalui doktrin kedaulatan ataupun sistem pemerintahan terpusat.
- b) Kedua, pluralis memberikan nilai pada otonomi kelompok dan organisasi, aktivitas, serta keanekaragaman yang ada di dalamnya (Hsiao, 1927 ; Nicholls, 1975).
- c) Ketiga, para pluralis percaya bahwa konflik kelompok giat sekali terjadi dalam masyarakat yang kompleks.

- d) Keempat, adanya perdebatan mengenai kegunaan pemeriksaan institusional ataupun sosial serta keseimbangan mekanisme untuk mencegah terjadinya “state monism”.
- e) Konsep yang kelima adalah meskipun para pluralis menentang politik individualism, namun mereka menyadari adanya bahaya diantara masyarakat dimana kepentingan pribadi merupakan motif yang dominan dan ikatan tradisional sosial pun seringkali absen (Dunleavy, Patrick and O’leary, Brendan, 1998)

Keanekaragaman juga adalah suatu realitas yang indah dan mengagumkan, warna-warni, berbeda-beda, dan betapa naifnya orang yang ingin menghilangkan keragaman tersebut, atau menyeragamkan dalam suatu formasi tertentu, membuat wacana bahkan menjadi monolitik. Dapat dikatakan bahwa pluralitas merupakan hal yang natural, sesuatu yang nyata adanya meskipun ada usaha-usaha untuk mencoba mereduksi kenyataan keragaman ini. Kenyataan sejarah memberi gambaran, kaitan-kaitan politik, kebudayaan, sains, bahkan sejarah itu sendiri direduksi ke dalam suatu prediksi ketertentuan, kepastian dan model yang sama.

Dari filsafat, term ini kemudian menyebar ke berbagai wacana akademis. Pada akhir abad XX, penganut pragmatis, William James, menggunakan kembali konsep ini dalam menekankan implikasi-implikasi empirik dari suatu ontologi pluralistik. Jejak-jejak dari penggunaan term tersebut masih bisa kita dapatkan dalam sosiologi kognitif. Pada saat yang

sama, pluralisme menjadi lebih populer dalam kesadaran politik mengenai kondisi demokrasi yang dilawankan dengan perangkat-perangkat negara monistik, khususnya dalam kajian yang dilakukan oleh Harold J. Hesky. Oleh karenanya, dalam diskusi-diskusi politik pluralisme dapat mengacu praktik-praktik politik yang sangat beragam, sampai dengan desentralisasi kekuasaan perangkat kenegaraan dan distribusi sumber-sumber kekuasaan dalam masyarakat.¹²

¹² Ubed Abdillah S, Politik Identitas Etnik, Yayasan INDONESIA TERATA, Magelang, 2002, hlm.04.

2.3 Teori dan Konsep Konflik Antar etnis

Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan sebagainya. Dengan dibawanya ciri-ciri individual dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

2.3.1 Definisi Konflik

Menurut Taquiri, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.¹³ Selain dapat menciptakan kerja sama, hubungan saling bergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi

¹³ Newstrom dan Davis 1977, *Human Behavior at work : Organizational Behavior*, Singapore: McGraw-Hill Inc.1977, hlm. 111.

jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.¹⁴

Keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik dalam organisasi, secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika memersepsikan bahwa dalam organisasi telah ada konflik, konflik tersebut telah menjadi kenyataan.¹⁵

Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling bergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.¹⁶ Selanjutnya, konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris, terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respons terhadap konflik tersebut; atau satu pihak memersepsikan adanya pihak lain yang atau akan menyerang secara negatif.¹⁷

2.3.2 Konflik Antar Etnis

Konflik terjadi yang berwujud wilayah rusuh di Indonesia merupakan akumulasi dari kerapuhan persatuan dan kesatuan warga masyarakat heterogen dalam satuan wilayah kebudayaan dengan kepentingan konspirasi kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri serta

¹⁴ Gibson, et. al. Organisasi dan manajemen (Prilaku-struktur-proses), Edisi Bhasa Indonesia, Jakarta: Erlangga, 1977 hlm. 437.

¹⁵ Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaka, Edisi Keenam, Jakarta: Perlindo, 1996, hlm. 122.

¹⁶ Minnerly, John R, Conflict Management in Urban Planning, England: Gower Publishing company Limited 1985, hlm. 123.

¹⁷ Loc. Cit., Robbins, hlm. 271.

pihak asing. Kepentingan itu dilaterbelakangi tujuan politik, ekonomi dan agama. Upaya itu tidak mencapai sasaran puncak karena ditingkat elit dan pelaksana pihak keamanan dan birokrasi mayoritas masih komit dengan negara kesatuan sehingga serius memperkecil zona konflik dan kefatalan berbagai dampaknya. Masyarakat dari berbagai suku dan agama juga tidak memiliki basic yang kuat memasuki kancah konflik bahkan sebaliknya dari semula sudah terbiasa hidup rukun dan damai dalam berbagai perbedaan. Namun begitu karena masyarakat telah semakin berpendidikan dan cerdas, ditambah dengan nuansa reformasi secara mencuatnya konsep HAM, mereka menginginkan agar berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan kehidupan mereka, seyogyanya mengikut sertakannya dalam merancang program itu sehingga sesuai sasaran.

Mengingat begitu beragamnya latarbelakang dan tingkat sosial masyarakat, maka persoalan hak dan kewajiban senantiasa muncul menjadi konflik sosial yang berkepanjangan dan terjadi di berbagai daerah. Konflik yang menggunakan simbol etnis, agama dan ras muncul yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta bagi pihak yang bertikai. Hal ini terjadi jika dalam hubungan tersebut terjadinya suatu kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran serta kekuasaan yang tidak seimbang. Kepentingan dan keinginan-keinginan yang tidak lagi harmonis akan membawa masalah dalam hubungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya.

Keragaman adalah realitas Indonesia yang tidak bisa ditolak. Keragaman elemen yang membentuk masyarakat politik (negara) Indonesia terlihat jelas dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu) secara jelas menyatakan bahwa keragaman Indonesia tidak bisa dihomogenisasi. Indonesia adalah satu dalam keragaman. Semboyan Bhineka Tunggal Ika itu telah mengantarkan Indonesia sebagai salah satu contoh negara yang mampu memelihara realitas keragamannya dan mendapatkan manfaat dari keragaman tersebut. Dalam hal keragaman agama, toleransi antarumat beragama merupakan modal sosial yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia, dan harus terus dipelihara untuk menjaga keutuhan Indonesia.

Keragaman sosio-kultural di dalam suatu bangsa atau negara memiliki intensitas konflik yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang struktur sosialnya bersifat homogen. Heterogenitas suatu bangsa sering kali menimbulkan konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan yang sering diistilahkan di Indonesia sebagai konflik suku, agama, ras dan aliran kepercayaan (SARA). Selain itu, gejala deferensiasi sosial (penggolongan sosial) jika tidak ditangani secara bijak akan menimbulkan kerawanan konflik sosial. Akan tetapi, di sisi lain keanekaragaman sosio-kultural suatu bangsa juga bisa menjadi kekayaan khazanah budaya bangsa dalam percaturan internasional, sehingga keanekaragaman sosial budaya juga berdampak pada keuntungan

ekonomis jika dikelola dengan baik. Selain keragaman sosiokultural, ketimpangan ekonomi juga memicu di antara para anggota masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat¹⁸ suatu kelompok adalah suatu kesatuan individu yang terikat antara lain :

- a. Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok;
- b. Suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya;
- c. Aktivitas-aktivitas berkumpul dari warga kelompok secara berulang-ulang;
- d. Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar warga kelompok;
- e. Suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok;
- f. Suatu system hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu. Salah satu kelompok tersebut adalah kekerabatan (klan). Klan besar (kelompok marga) merupakan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis keturunan sejenis ialah keturunan warga-warga pria maupun wanita.

¹⁸ Koentjaraningrat,. Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1981, hlm. 109.

Beberapa faktor yang memungkinkan konflik etnis muncul ke permukaan menjadi konflik terbuka adalah:

- a) *pertama*, perubahan konstelasi politik pada masa reformasi dan iklim kebebasan yang dijunjung tinggi menjadi ladang subur untuk mengungkapkan keresahan beberapa kelompok etnik.
- b) *Kedua*, tidak meratanya pembangunan diberbagai wilayah di Indonesia, disadari atau tidak terpolarisasi berdasarkan kelompok etnik.
- c) *Ketiga*, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat Indonesia, identitas etnik menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat, terutama perdesaan.¹⁹

Penyebab konflik antar etnis dengan beberapa kasus konflik etnis yang pernah terjadi diberbagai tempat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat.²⁰

- a) *Pertama*: Dilema keamanan kelompok etnik. Segala usaha untuk meningkatkan keamanan yang dilakukan suatu kelompok sehingga menimbulkan reaksi balik dari kelompok lain dan apada akhirnya membuat kelompok tersebut merasa kurang aman. Teori menjelaskan adanya otoritas

¹⁹ Wirutomo, Paulus. "Menggagas Indonesia Masa Depan?" Makalah yang dipresentasikan dalam Dies Natalis UI, 2012. Lihat Konflik Etnik di Indonesia : Satu Kajian Kes di Bandararaya Medan oleh Subanindyo Hadiluwih, USU Press, 2008 dan Konflik Komunal di Indonesia saat ini, INIS, Jakarta, 2003.

²⁰ Ibid

perang yang dapat terjadi jika suatu kelompok memiliki rasa tidak percaya pada kelompok etnis lain dan rasa tidak percaya ini berkembang menjadi mobilisasi kekuatan yang menegaskan kecurigaan antar kelompok yang juga menunjukkan maksud agresif, kondisi pemerintahan yang lemah, pemerintah pusat menjadi bagian dari konflik, situasi perubahan yang mendadak.

- b) *Kedua*: Perlindungan status. Kelompok berperang mempertahankan status sehingga muncul ketakutan bahwa nilai-nilai dan cara hidup serta institusi kelompok etnis tertentu bisa menjadi sub-ordinat kelompok etnis lain.
- c) *Ketiga*: Ambisi hegemoni. Suatu kelompok yang berkuasa tidak cukup puas dengan bertahannya nilai-nilai budaya dan institusi mereka, tetapi ingin menjadi kelompok dominan yang menuntut perlakuan tertentu dari pemerintah. Keempat, Aspirasi kaum elit. Adanya ambisi dari elit kelompok etnik tertentu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan isu-isu ketakutan, kebencian, dan ambisi kelompok etnik.

Sebagai sebuah negara yang multietnis di Indonesia sudah banyak terjadi kasus kekerasan antar-etnis, terutama antara etnis lokal dengan etnis pendatang, serta sudah memakan banyak korban jiwa, seperti di Sambas Kalimantan Barat yaitu konflik antar etnik Dayak dan Madura.

Akar terjadinya konflik antara etnik Dayak dan Madura berawal dari adanya perbedaan sosial budaya yang melahirkan perbedaan pemahaman, sikap dan perilaku yang dapat memunculkan pandangan negatif, kebencian dan antipati, sehingga peristiwa yang semula sepele yang hanya dilakukan oleh individu berubah menjadi penyulut meledaknya konflik yang melibatkan etnik. Begitu pula yang terjadi di Ambon Maluku yaitu konflik yang diawali oleh pertikaian antara dua individu berbeda etnis. Pertikaian tersebut melebar menjadi konflik antar pendatang dan penduduk lokal. Akhirnya konflik bergeser menjadi konflik bernuansa agama, yaitu antara meraka yang beragama Islam (Salam) dengan Protestan dan Katolik (Nasrani).

Bahwa kerusuhan etnik berakar dari kesenjangan sosial-ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan dihancurkan.²¹ menyebutkan dalam banyak kasus, konflik dan kekerasan bernuansa etnik, agama yang pecah di tengah masyarakat lebih dilatarbelakangi kondisi sosial, ekonomi, dan politik daripada perbedaan keyakinan. Bahkan agama, etnik, ras, suku sering diperalat sebagai faktor legitimasi untuk menggerakkan emosi dan solidaritas primordial. Sejarah membuktikan, manipulasi agama, etnik, ras, suku untuk kepentingan sosial, ekonomi dan politik sangat membahayakan kehidupan suatu negara bangsa. Agama, etnik, ras sering dijadikan alat pemicu kekerasan.

²¹ Pelly, Usman. Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. Dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 58, 1999, hlm.34.

Meskipun ada faktor-faktor lain yang selalu berkelindan di ketiak agama, etnis, ras, suku, sehingga seakan ia telah mendapatkan legitimasi dari identitas sosial.

Sulaeman Munandar (2003) menjelaskan bahwa konflik sosial sering muncul belakangan ini merupakan indikator dari proses transformasi sosial yang sedang berlangsung, berupa representasi benturan nilai sosial dan nilai agama serta sedang terjadi pergeseran setting penguasaan sumber daya strategis berupa kekuasaan atau politik dan ekonomi. Mungkin adanya pergeseranpergeseran peran kelompok dalam masyarakat yang dapat menimbulkan pertentangan dan kontradiksi atau disorganisasi struktur, kultur dan pola relasi antar individu dan kelompok²².

Kelompok sosial sendiri adalah suatu kelompok yang tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama dan menyepakati dengan nilai-nilai dan moral yang ada dalam kehidupannya. Jika ada suatu kelompok sosial lain yang ingin mendominasi kelompok tersebut, maka akan terjadi konflik karena potensi konflik tersebut telah terpicu akan pendominasian itu. Ini dikarenakan Indonesia belum mengfungsikan unsur-unsur bangsa menjadi suatu integrasi yang kuat. Keberagaman agama, suku, dan budaya merupakan salah satu potensi konflik yang sangat menonjol di negara Indonesia yang kaya akan budaya. Sekarang bagaimana dengan

²² Munandar Sulaeman, Konflik Multi Dimensi Masyarakat Tasikmalaya (Kajian Kerusuhan 1966 dan Pasca Kerusuhan 1997-2001), Disertasi Program Doktor Dalam Sosiologi Universitas Indonesia, 2003.

keberagaman tersebut Indonesia dapat berintegrasi dengan kuat dan membentuk suatu kesatuan yang kuat agar tidak terjadinya konflik-konflik yang tidak diinginkan.

Suparlan (1989) mengemukakan bahwa faktor perbedaan budaya yang tercermin dalam perbedaan sistem nilai budaya dan sistem orientasi budaya suatu masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Perbedaan sistem nilai dan orientasi budaya inilah yang selanjutnya muncul dalam sikap, mental, perilaku, dan perbuatan anggota atau masyarakat etnik tertentu yang bertentangan dengan kelompok etnik lain. Bila kita melihat peta konflik pada masyarakat Indonesia maka terdapat beberapa jenis konflik internal berdasarkan pihak yang terlibat, seperti : konflik komunal (antar penduduk lokal dan pendatang); gerakan separatis (kelompok etnis dengan mengancam kutuhan Negara)²³.

2.3.3 Bentuk-bentuk Konflik Sosial

a. Berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif

- 1) Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik poso, ataupun konflik balinuraga dan mesuji dan lain sebagainya.

²³ Suparlan, Parsudi, Interaksi Antaretnik di Beberapa Provinsi di Indonesia. Jakarta; Depdikbud, 1989.

2) Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.²⁴

b. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik

- 1) Konflik Vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
- 2) Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.
- 3) Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.²⁵

²⁴ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Sosial* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 98

²⁵ Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja* (Malang: Taroda, 2002), h. 67

2.3.4 Pencegahan Konflik (*Conflict Prevention*)

Menurut Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya ketegangan antara satu pihak dengan pihak lain.²⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara mengalahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. kata *conflict* dipahami sebagai hubungan yang tidak harmoni antar individu. Sedangkan kata *prevention* dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan, artinya proses awal dari serangkaian upaya pengelolaan konflik. Konflik juga berarti proses yang menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain seperti konflik kelas.

Jacob Bercovitch memberikan definisi pencegahan konflik yaitu pencegahan konflik pada dasarnya adalah tentang sarana mengakhiri bagaimana mengidentifikasi situasi yang mungkin menjadi berbahaya, kekerasan sangat merusak dan bagaimana untuk mengentikan mereka menjadi demikian. ini bukan tentang mencegah konflik sehari-hari melainkan menghindari kekerasan dan perusakan secara turun-temurun

Pencegahan konflik memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda dan tidak ada definisi tunggal yang disepakati. Selama Perang

²⁶ Selo Soemardjan, Soemardi, Soeleman, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), h. 177 Tersedia : <http://filsafatafif.blogspot.com/2017/10/makalah-pencegahan-konflik-pembagian.html>. Tanggal diakses 15/01/2021

Dingin, banyak praktisi dan akademisi memandang tindakan pencegahan sebagai hal yang identik dengan serangan pendahuluan.²⁷ Setelah Perang Dingin, ini berubah, dan tindakan pencegahan telah menerima arti baru dan penekanan telah bergeser ke pencegahan sengketa secara damai. Dengan hormat untuk pengembangan konsep pencegahan konflik, Anders Bjurner telah menunjukkan bahwa pencegahan konflik adalah sub-budaya yang cukup baru dari studi keamanan dan kebijakan luar negeri. Ini dalam arti tertentu benar, tapi satu harus dicatat bahwa itu adalah sub-budaya dengan sejarah yang panjang. Memang, idenya pencegahan menjadi pusat selama kongres Wina pada tahun 1815 (AD) dan dalam tulisan Sun Tzu (c. 403-221 SM)²⁸

Pencegahan konflik itu tidak pernah disebut sebagai konsep tetapi dalam praktiknya ada perhatian praktis untuk mencegah konflik dan mencegah terulangnya konflik. Pencegahan konflik sering dibagi menjadi dua kategori: *pencegahan langsung dan pencegahan struktural*.

- a. Pencegahan konflik langsung mengacu pada tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencegah jangka pendek, yang seringkali segera terjadi, eskalasi konflik

²⁷ Peter Wallensteen, ed., *Preventing Violent Conflicts: Past Record and Future Challenges*, Report No. 58, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden, (Uppsala: Department of Peace and Conflict Research, 1998).

²⁸ For a more extensive overview of the history of conflict prevention see Alice Ackerman, "The Idea and Practice of Conflict Prevention", *Journal of Peace Research*, vol 40, no 3 (2003), 339-347; Karin Aggestam, "Conflict Prevention: Old Wine in New Bottle?", *International Peacekeeping*, Volume 10, No. 1 (2003). Tersedia : https://www.files.ethz.ch/isn/113660/2005_swansson-weissman_concept-paper_conflict-prevention-management-and-beyond.pdf. 19/01/2021

potensial. Contoh pengiriman mediator atau penarikan pasukan militer.

- b. Pencegahan struktural lebih berfokus pada tindakan jangka panjang yang mengatasi penyebab mendasar dari suatu potensi konflik bersama dengan faktor-faktor yang berpotensi meningkat dan memicu. Contoh Bantuan pembangunan ekonomi atau peningkatan partisipasi politik.

Perbedaan antara pencegahan struktural dan langsung sangat penting terutama di bidang kebijakan meski banyak tindakan seperti militer pelucutan senjata dapat memiliki efek struktural dan langsung. Konsep selanjutnya yang perlu didefinisikan adalah pencegahan konflik. Meskipun beragam tulisan tentang pencegahan konflik, ada yang kurang konsensus tentang definisinya.²⁹

Dengan demikian ada berbagai macam definisi, mulai dari yang lebih sempit yang berfokus pada cara terbatas pencegahan seperti definisi diplomasi preventif Michael Lund, untuk yang luas seperti definisi David Carment dan Albrecht Schnabel tentang pencegahan konflik. Michael

²⁹ Alice Ackerman, "The Idea and Practice of Conflict Prevention", *Journal of Peace Research*, vol 40, no 3 (2003), 339-347; Karin Aggestam, "Conflict Prevention: Old Wine in New Bottle?", *International Peacekeeping*, Volume 10, No. 1 (2003); Fen Osler Hampson and David M. Malone, eds., *From Reaction to Conflict Prevention :Opportunities for the UN System* (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2002); Bruce W. Jentleson, 'Preventive Diplomacy: A Conceptual and Analytic Framework', in *Opportunities Missed, Opportunities Seized: Preventive Diplomacy in the Post-Cold War World*, ed. Bruce W. Jentleson (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000); Paul van Tongeren, Hans van de Veen and Juliette Verhoeven, eds., *Searching for Peace in Europe and Eurasia: An Overview of Conflict TPrevention and Peacebuilding Activities* (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2002); William I. Zartman, "Preventing Deadly Conflict", *Security Dialogue* 32(2) (2001), 137-154.

Lund mendefinisikan diplomasi *preventif* sebagai “Tindakan yang diambil di tempat dan waktu yang rentan untuk menghindari ancaman atau penggunaan senjata kekuatan dan bentuk-bentuk paksaan terkait oleh negara atau kelompok untuk menyelesaikan politik perselisihan yang dapat timbul dari efek destabilisasi ekonomi, sosial, politik, dan perubahan internasional.³⁰

Mediator dalam pencegahan konflik adalah pembuatan saluran untuk dialog antar kelompok yang bersaing, penyebaran pencegahan, dan tindakan membangun kepercayaan. Pencegahan struktural lebih dari itu bersifat jangka panjang dan termasuk langkah-langkah yang memfasilitasi tata kelola, kepatuhan hak asasi manusia, dan ekonomi, politik, dan stabilitas sosial, serta sipil pembangunan masyarakat. Namun demikian, hubungan keduanya jenis pencegahan tetap 'rumit' karena tidak selalu selalu satu kali pengurutan tetapi juga salah satu yang operasional pencegahan mungkin berjalan paralel dengan structural pencegahan, atau keduanya mungkin mendukung masing-masing lain. Apalagi operasional dan *structural* pencegahan mempengaruhi 'berbagai bagian masyarakat untuk jangka waktu yang berbeda' (Wallensteen, 2002: 214). Pencegahan struktural juga mungkin bertemu dengan resistensi yang lebih kecil terhadap implementasi sejak tindakan pencegahan structural dapat dimasukkan ke dalam perkembangan program bantuan, seperti saat ini

³⁰ Michael Lund, *Preventing Violent Conflicts* (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1996), 37. : https://www.files.ethz.ch/isn/113660/2005_swanstrom-weissman_concept-paper_conflict-prevention-management-and-beyond.pdf. 19/01/2021

dilakukan oleh sejumlah internasional dan lembaga pemerintah. Namun, beberapa contoh sensus tentang ruang lingkup pencegahan konflik menjadi penting karena parameter konseptualnya penting untuk menetapkan parameter strategi pencegahan konflik yang efektif.

Pencegahan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan mediasi yang tidak mesti dilibatkan oleh pihak ketiga yakni seorang yang diutus untuk memediasi. Namun, dapat dilakukan dengan konseptual yang lebih efektif dengan berkegiatan bersama dilingkungan masyarakat.

2.4 Telaah Pustaka

Penelitian ini berjudul "*Pluralisme Kota Makassar* Penerimaan Komunitas Mahasiswa Papua di Kota Makassar" ini bertempu pada 5 literatur utama. 3 literatur Buku dan 2 literatur lainnya berupa jurnal.

Literatur pertama merupakan Buku yang berjudul "Manajemen Konflik" pengantar Mohammad Najib buku ini landasan dasar untuk memahami konflik, mengidentifikasi tahap-tahap konflik, langkah konflik konstruktif, mengembangkan pendekatan yang dapat di percaya manajemen konflik. Literatur ini menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor utama konstruktivis membangun analisis pada penelitian ini, mengidentifikasi mengenai konflik. Karena peneliti mengambil Studi Kasus penerimaan masyarakat papua di kota Makassar, sangat berkaitan dengan konflik.

Buku ini membahas tentang konflik yang secara luas, bahwa konflik itu hanya berskala besar yang bisa membuat gesekan di masyarakat, namun pada kenyataannya permasalahan di keluarga juga merupakan konflik yang berskala kecil, beberapa pandangan mengenai peran konflik sisi lain dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok. Literatur ini juga mengidentifikasi beberapa macam konflik menurut Soerjono Soekanto. Peneliti juga melihat bahwa keberadaan etnik diluar asli dari daerah tertentu, dapat menimbulkan konflik yang berujung diskriminasi kaum yang minoritas.

Literatur Kedua merupakan Buku yang berjudul “Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme” Pengantar Hendar Putranto, buku ini membahas tentang Pancasila sebagai landasan untuk menjadi sebuah Kebhinekaan, Pancasila sebagai Ideologi Nasionak dan Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sedikit melihat kilas sejarah, pembahasan tentang letak keunggulan Ideologi Pancasila dibandingkan Ideologi-ideologi besar dunia. Buku ini juga menjelaskan beberapa Ideologi dunia, doktrin dan karakteristik dari Ideologi Liberalisme-Kapitalisme, Sosialisme,Marxisme-Leninisme (Komunisme), Fasisme-Totalitarianisme-Nasionalsosialisme(Nazi), dan Sosial-Demokrasi.

Menjelaskan persoalan Seputar Multikulturalisme yang menjadikan konspe pembicaraan untuk keragaman atau *Pluralisme* yang juga menyangkut tentang hak-hak asasi manusia, guna menjustifikasi perlakuan adil terhadap kelompok-kelompok minoritas Willy Kymlika membagi menjadi 2 Kategori dasar, Yaitu: *polyethnic* atau kelompok-kelompok imigran, dan minoritas nasional.

Literatur Ketiga merupakan Buku yang berjudul “Politik Identitas Etnis” Pergulatan Tanda tanpa Identitas, Buku ini ditulis oleh Ubed Abdillah S. Pembahasan buku ini difokuskan pada realitas keragaman etnis pada kajian politik etnis, pola politiknya sepanjang sejarah secara umum, sampai dengan bagaimana peran etnis dalam kancah globalisme dan postmodernisme. Politik identitas sendiri adalah politik yang kajiannya terfokus pada permasalahan yang menyangkut perbedaan-perbedaan

yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh. Masalah-masalah itu mencakup persoalan politik yang dimunculkan akibat problematika gender, feminisme dan maskulinisme, persoalan politik etnis yang secara mendasar berbeda fisik dan karakter fisiologis, dan pertentangan-pertentangan yang dimunculkannya, atau persoalan-persoalan politik karena perbedaan agama, kepercayaan, dan bahasa dalam situasi yang sangat multidimensional.

Buku ini juga membahas sebuah keragaman etnik, budaya, rasa hingga bangsa, yang sering terjadi sebuah pertentangan dalam bersosial. Bahkan memunculkan perdebatan tentang rasisme yang sering terjadi dalam masyarakat akibat dari sebuah Multikulturalisme dan juga bagian dari Pluralisme, keadaan ini yang memunculkan sebuah konflik. Namun, menunjukkan sebuah toleransi dalam politik yang dilandasi sebuah moralitas.

Selanjutnya, Literatur Ke empat merupakan Jurnal yang berjudul "Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama" jurnal ini ditulis oleh Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag dan Nurjanah, M.A asal Universitas Islam Negeri Maliki, Malang pada 2013 lalu.

Literatur ini secara umum membahas mengenai Pluralisme agama yang menunjukkan fakta sosiologis tentang pola kehidupan masyarakat sangat kental pluralisme agama yang tak terbantahkan. Inilah ekspresi

internalisasi nilai-nilai substantif dari setiap agama itu disyariatkan untuk umat manusia.

Dalam jurnal ini menyinggung tentang pluralisme secara harfiah dimana menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia yang ditandai dengan perbedaan agama, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa pluralitas mengandung bibit perpecahan, sehingga diperlukan toleransi, keterbukaan, kesetaraan, dan penghargaan. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dan bukan konflik dalam masyarakat. Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang merupakan salah satu pilar demokrasi.

Menyadari bahwa pluralisme masyarakat kota begitu tinggi, dan oleh karena itu, potensi konflik juga sangat tinggi, maka posisi elit atau tokoh dan pemuka agama menjadi penting artinya dalam menuntun umat menuju kehidupan yang damai. Posisi elit dan tokoh serta pemuka agama penting dalam menjelaskan kepada umatnya masing-masing mengenai akar-akar penyebab kekerasan dan konflik serta cara menanganinya secara patut.

Literatur Kelima, merupakan jurnal yang berjudul "Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: a conceptual exploration" jurnal ini di tulis oleh Niklas L.P. Swanstrom dan Mikael S. Weissmann asal Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Policy Center Johns Hopkins University-SAIS, 1619 Massachusetts Ave. NW, Washington, D.C. 2005, membahas

tentang Pencegahan Konflik(*Conflict Prevension*) merupakan suati studi kasus yang sering terjadi di persoalan militer atau tentang perdamaian dunia, namun penulis berpikir bahwa pencegahan konflik bisa di gunakan dalam mencegah terjadinya konflik di masyarakat khususnya berbeda suku,ras, dan agama. Literatur ini

Pencegahan konflik tidak hanya berfungsi ketika sebelum terjadinya konflik, namun dapat berguna ketika konflik itu sedang terjadi, agar meminimalisir terjadinya konflik yang lebih besar, konsep ini terbagi menjadi dua yakni : Pencegahan Struktural dan Pencegahan Langsung yang di kemukakan oleh Alice Ackerman yang membahas tentang mediasi dalam konflik. Definisi lain yang lebih luas diberikan oleh Gabriel Munuera, yang mendefinisikan konflik pencegahan sebagai penerapan tindakan yang tidak membatasi terutama bersifat diplomatik. Langkah-langkah yang tidak membatasi adalah itu yang tidak memaksa dan bergantung pada niat baik pihak yang terlibat.

2.5 Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, dapat dilihat dari banyaknya suku, agama, ras dan bangsa. Keragaman suku/bangsa di Indonesia sering kali menimbulkan konflik antara perbedaan suku yang menjadi persoalan. Peneliti ingin melihat bagaimana sebetulnya penerimaan terhadap keberadaan komunitas mahasiswa papua di kota Makassar, peneliti juga ingin melihat cara beradaptasi dengan kehadiran mahasiswa papua di kota Makassar, sebab konflik yang terjadi antara komunitas mahasiswa papua cenderung kurang terjadi di kota Makassar.

Untuk menjawab pernyataan di atas, maka peneliti akan mencoba melihat bentuk penerimaan komunitas mahasiswa papua dalam menekan konflik. Dengan menggunakan Pencegahan Konflik (*conflict prevention*), peneliti berharap hasil penelitian yang didapat tidak menjadi sebuah pembeda antar suku, namun menjadi sebuah persatuan dalam Bhenika Tunggal Ika.

Jadi, peneliti melihat bagaimana sikap masyarakat Makassar dengan kehadiran komunitas mahasiswa papua. Penerimaan mahasiswa papua dapat mencegah terjadinya konflik.

2.6 Skema Pikiran

